

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Teori Agensi

Teori agensi berfokus pada perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Teori ini dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa teori keagenan adalah sebuah kontrak yang diberikan oleh pemilik (prinsipal) kepada manajer (agen) untuk pengambilan dan pembuatan keputusan operasional perusahaan. Pihak agen dan prinsipal dipisahkan oleh wewenang yang bertujuan untuk mencapai keefektifan dan keefisienan dalam pengelolaan perusahaan. Namun, pemisahan tersebut menyebabkan munculnya potensi konflik karena agen dapat mementingkan kepentingan pribadi dan mengorbankan kepentingan prinsipal (Adityamurti & Gozali, 2017). Perbedaan kepentingan tersebut dapat memengaruhi kinerja dan kebijakan perusahaan.

Agen menginformasikan kinerjanya melalui laporan keuangan sehingga mempunyai informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan prinsipal. Perbedaan kepemilikan informasi tersebut yang menyebabkan timbulnya asimetri informasi. Agen dapat mengatur laporan keuangan yang berfokus kepada peningkatan laba perusahaan dengan melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban yang dapat memengaruhi laba salah satunya adalah beban pajak. Menekan beban pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan agen untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Retnaningdya & Cahaya, 2021; Irawan, et al., 2017).

Konflik kepentingan yang terjadi pada praktik penghindaran pajak dapat didasari oleh teori agensi karena perusahaan dan pemerintah memiliki kepentingan berbeda dan bertolak belakang. Pada teori agensi penghindaran pajak merupakan upaya meminimalan kewajiban pajak secara legal oleh pihak perusahaan sebagai agen sedangkan di sisi lain pemerintah sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) tidak menginginkan adanya praktik penghindaran pajak karena pendapatan negara menjadi berkurang (Dewi & Noviary, 2017). Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dapat menimbulkan ketidakpatuhan pembayaran pajak dari wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan sehingga akan menyebabkan perusahaan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak (Irawan, et al., 2017).

2.2 Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Pembangunan berkelanjutan yang digunakan untuk memajukan negara memerlukan pendanaan yang besar, hal tersebut salah satunya didapatkan dari pajak negara. Hal tersebut menyebabkan pajak merupakan salah satu peran penting bagi keuangan negara. Penerimaan pajak di Indonesia adalah yang terbesar dari pada penerimaan negara dari sektor lain, tanpa pajak negara kesulitan untuk memenuhi kebutuhan negara (Mahpuding, et al., 2020). Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah kepada wajib pajak yang akan digunakan untuk membiayai keperluan negara.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut DJP pajak memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin negara.

2. Fungsi mengatur

Pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi stabilitas

Dengan pajak, pemerintah memiliki dana untuk mengatur kebijakan harga yang berhubungan dengan stabilitas harga supaya inflasi dapat terkendali.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak dapat digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan umum dan juga pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

2.2.3 Pengelompokan Pajak Berdasarkan Golongan, Sifat dan Lembaga Pemungutnya

1. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh).

- b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain, contohnya pajak pertambahan nilai (PPN)
2. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- a. Pajak subjektif adalah pajak yang ditinjau dari subjeknya dengan memperhatikan kondisi atau keadaan dari wajib pajak.
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang ditinjau dari objeknya tanpa memperhatikan kondisi atau keadaan dari wajib pajak.
3. Menurut lembaga pemungutnya
- a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat terdiri atas PPh, PPN, Pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM), dan Bea materai.
 - b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak atas kendaraan di atas air serta pajak kabupaten atau kota contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak yang disesuaikan dengan potensi suatu daerah tersebut.

2.2.4 Hambatan Pemungutan Pajak

- 1. Perlawanan pasif disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat dan juga sistem kontrol yang belum dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif merupakan semua tindakan maupun usaha secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan aktif terdiri dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

2.3 Penghindaran Pajak

Perusahaan yang menginginkan laba maksimal akan cenderung melakukan berbagai cara untuk menekan beban perusahaan, salah satunya adalah beban pajak. Terdapat beberapa cara untuk menekan beban pajak, namun cara yang legal dan dapat dilakukan adalah dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak termasuk dalam bentuk perlawanan aktif terhadap pajak yang bersifat legal dengan cara memanfaatkan ketentuan perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan seperti memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak dan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Faramitha, et al., 2020).

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan wajib pajak menahan diri atas suatu barang yang dikenakan pajak. Cara yang kedua dapat dilakukan dengan memindahkan subjek atau objek pajak ke domisili yang memiliki tarif pajak rendah. Cara terakhir adalah dengan penghindaran pajak secara yuridis yaitu memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan Undang-Undang (*loopholes*) Perpajakan (Santoso & Rahayu, 2019).

Menurut Windaryani & Jati (2020), penghindaran pajak adalah usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan utang pajak yang harus dibayar perusahaan

dengan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku. Penghindaran pajak memiliki tujuan untuk memodifikasi laporan fiskal wajib pajak agar beban pajak dapat berkurang dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang ada guna menekan laba setelah pajak. Penghindaran pajak sah dilakukan karena hal tersebut merupakan tindakan legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* berada di *grey area* antara *tax compliance* dengan *tax evasion* karena tidak ada peraturan pajak yang dilanggar perusahaan yang melakukan praktik tersebut tetapi akan merugikan negara karena penerimaan sektor pajak menjadi rendah.

Penghindaran pajak memiliki dampak terhadap negara. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung berupa terjadinya stagnasi pada pertumbuhan ekonomi dan perputaran ekonomi negara karena penerimaan negara dari sektor pajak berkurang secara signifikan. Sedangkan dampak tidak langsung adalah berkurangnya dana atau subsidi pemerintah bagi masyarakat miskin (Moeljono, 2020). Pengukuran penghindaran pajak dapat dilakukan dengan menghitung jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan perusahaan (Hanlon & Heitzman, 2010).

2.4 Pertumbuhan Penjualan

Menurut Kasmir (2012), pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan tingkat keberhasilan operasional perusahaan dari waktu ke waktu sehingga pertumbuhan penjualan

merupakan hal yang sangat penting bagi pendapatan perusahaan. Semakin tinggi tingkat penjualan maka pendapatan yang akan didapat juga semakin besar. Pertumbuhan penjualan juga digunakan sebagai proksi pertumbuhan di masa mendatang (Wahyuni & Wahyudi, 2021). Rasio pertumbuhan penjualan adalah rasio yang mengukur pertumbuhan penjualan dengan nilai penjualan pada suatu periode (Widayanti & Rikah, 2021).

2.5 Konservatisme Akuntansi

Laporan keuangan memberikan data informasi mengenai keadaan perusahaan. Laporan keuangan digunakan oleh publik untuk menilai kinerja perusahaan. Disisi lain pihak internal menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan berbagai kebijakan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan dibuat melalui akuntansi keuangan perusahaan yang didasari pada kegiatan operasional perusahaan sehingga menghasilkan laporan yang memiliki *true value*. Berkaitan dengan pengungkapan *true value* tersebut terdapat suatu konsep yang disebut konservatisme akuntansi. Konservatisme dapat diinterpretasikan sebagai kehati-hatian (*prudent*), namun dalam kehati-hatian tersebut terdapat indikasi laporan di dalamnya memiliki kecenderungan pesimisme. Hal tersebut menghasilkan laporan yang tidak lagi memberikan *true value* tetapi cenderung lebih rendah dari *true valuenya* (Savitri, 2016).

Penerapan akuntansi yang konservatif menjadikan perusahaan menunda pengakuan laba dan mengakui dengan cepat ketika terjadinya kerugian. Penerapan konservatisme akuntansi akan memengaruhi laporan keuangan yang akan disajikan, padahal laporan keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan bagi

manajemen terkait dengan kebijakan perusahaan. Termasuk juga kebijakan perusahaan mengenai perpajakan. Dasar pengenaan pajak WP badan adalah laba perusahaan. Prinsip akuntansi konservatif digunakan perusahaan untuk meminimalkan laba perusahaan sehingga dasar pengenaan pajaknya dapat menjadi rendah (Rosdiani & Hidayat, 2020).

Akuntansi yang konservatif juga diartikan sebagai sikap pesimistik dalam akuntansi. Akuntan bersikap pesimis terhadap ketidakpastian laba atau rugi sehingga memilih untuk memperlambat pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya. *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 2* mengartikan bahwa konservatisme sebagai suatu reaksi yang hati-hati (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk memastikan ketidakpastian dan risiko *inherent* dalam lingkungan bisnis yang cukup dipertimbangkan.

Menurut Savitri (2016), pengakuan prinsip konservatisme dalam PSAK terdapat pada pilihan metode pencatatan di sebuah kondisi yang sama. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan angka dalam laporan keuangan dan menyebabkan laba yang cenderung konservatif. Berikut beberapa metode pencatatan dalam PSAK yang dapat menimbulkan laporan keuangan yang konservatif:

1. PSAK No. 14 tentang persediaan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat mencatat biaya persediaan dengan menggunakan salah satu metode FIFO (*first in first out*) dan metode rata-rata tertimbang.
2. PSAK No. 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain yang mengatur estimasi masa manfaat suatu aktiva tetap. Estimasi tersebut didasari pada pertimbangan

manajemen sehingga standar tersebut memungkinkan perusahaan mengubah masa manfaat aktiva.

Konservatisme dalam akuntansi masih bertahan karena pengguna masih merasakan manfaat dari pelaporan yang konservatif. Salah satu manfaat akuntansi yang konservatif adalah untuk menghindari perilaku oportunistik manajemen dalam melakukan peningkatan laba perusahaan (Watts, 2003). Perlakuan akuntansi konservatif juga memiliki konsekuensi bahwa laporan keuangan akan menjadi *understatement* atau memiliki nilai yang lebih rendah dari seharusnya karena menunda pengakuan laba, sehingga menyebabkan terjadinya *overstatement earnings* di masa mendatang apabila terjadi verifikasi terhadap hal-hal yang menguntungkan telah dilakukan.

2.6 Risiko Perusahaan

Risiko perusahaan merupakan volatilitas *earning* perusahaan yang diukur menggunakan rumus standar deviasi. Risiko perusahaan merupakan penyimpangan dari standar deviasi baik bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) maupun lebih dari yang direncanakan (*upset potential*). Semakin besar deviasi *earning* perusahaan maka akan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Hal tersebut bergantung pada karakter pimpinan perusahaan. Semakin berani seorang pemimpin mengambil risiko terhadap kebijakan perusahaan, maka semakin tinggi risiko perusahaannya (Paligrova, 2010).

Kebijakan yang diambil perusahaan terlihat dari karakter seorang eksekutif perusahaan. Semakin besar risiko perusahaan semakin tinggi pula kecenderungan karakter *risk taking* yang dimiliki eksekutif. Sebaliknya, jika karakter eksekutif

perusahaan cenderung *risk averse*, maka risiko perusahaan kecil karena eksekutif dengan karakter *risk averse* akan memilih keputusan-keputusan yang memiliki risiko kecil yang dapat berdampak pada operasional perusahaan (Moeljono, 2020).

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mempertegas dan mendukung latar belakang serta landasan teori penelitian. Penelitian terdahulu juga digunakan sebagai referensi yang relevan bagi penelitian ini. Berikut tabel penelitian terdahulu:

Tabel 2.7 1
Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Alat Pnalisis	Hasil penelitian
1.	Dwi Urip Wardoyo, Adliana Dwi Ramadhanti dan Dewi Ummu Annisa (2022)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran perusahaan (X1), <i>leverage</i> (X2) dan profitabilitas (X3) <i>Tax avoidance</i> (Y)	Regresi Linear berganda dengan aplikasi SPSS	<i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Adi Widayanti, Rikah (2021)	Faktor-Faktor yang Memengaruhi <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi (<i>Consumer Goods</i>) Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	Profitabilitas (X1), umur perusahaan (X2), <i>leverage</i> (X3), pertumbuhan penjualan (X4) <i>Tax avoidance</i> (Y)	Regresi linear berganda	Profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Umur perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>tax</i>

No .	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Alat Pnalisis	Hasil penelitian
					<i>avoidance</i> , sedangkan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
3.	I Gusti Agung Istri Windaryi & I Ketut Jati (2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Konservatime Akuntansi pada <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran perusahaan (X1), kepemilikan institusional (X2), konservatisme akuntansi (X3) <i>Tax avoidance</i> (Y)	Regresi linear berganda dengan program SPSS	Ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan konstitusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Namira Ufrida Rahmi, Desika Nur'saadah, Freddy Salim (2020)	Pengaruh <i>Corporate Risk, Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Sektor Pertambangan	<i>Corporate risk</i> (X1), <i>leverage</i> (X2) dan <i>sales growth</i> (X3) <i>Tax avoidance</i> (Y)	Regresi linear sederhana	<i>Corporate Risk</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Sales growth</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Ni Putu Swandwi dan Naniek Noviari (2020)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> dan Konservatime Akuntansi pada <i>Tax Avoidance</i>	<i>Financial distress</i> (X1) dan konservatisme akuntansi (X2) <i>Tax avoidance</i> (Y)	Regresi linear berganda	Variabel <i>financial distress</i> berpengaruh positif signifikan pada <i>tax avoidance</i> . Konservatisme akuntansi berpengaruh negatif signifikan pada <i>tax avoidance</i> .
6.	Yanti Budiasih & Ahla Amani (2019)	Faktor-Faktor yang Memengaruhi <i>Tax Avoidance</i> pada	Ukuran perusahaan (X1), ROA (X2), <i>leverage</i> (X3),	Regresi linear berganda	Profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage secara simultan

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Alat Pnalisis	Hasil penelitian
		Perusahaan Manufaktur Sub sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017	<i>Tax avoidance</i> (Y)		berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara parsial menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> tetapi variabel profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Safirra Salsa Nabilla dan Imam Zul Fikri (2018)	Pengaruh Risiko Perusahaan, <i>Leverage</i> (DER), Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan & Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)	Risiko perusahaan (X1), <i>leverage</i> (<i>debt to equity ratio</i>) (X2), pertumbuhan penjualan (X3) <i>Tax avoidance</i> (Y)	Regresi panel data	Risiko perusahaan, <i>leverage</i> (<i>debt to equity ratio</i>), pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
8.	Novi Sundari dan Vita Aprilia (2017)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal, dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Konservatisme akuntansi (X1), Intensitas asset tetap (X2), kompensasi rugi fiskal(X3), Kepemilikan manajerial (X4)	Regresi linear berganda	Konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Kompensasi rugi fiskal, intensitas

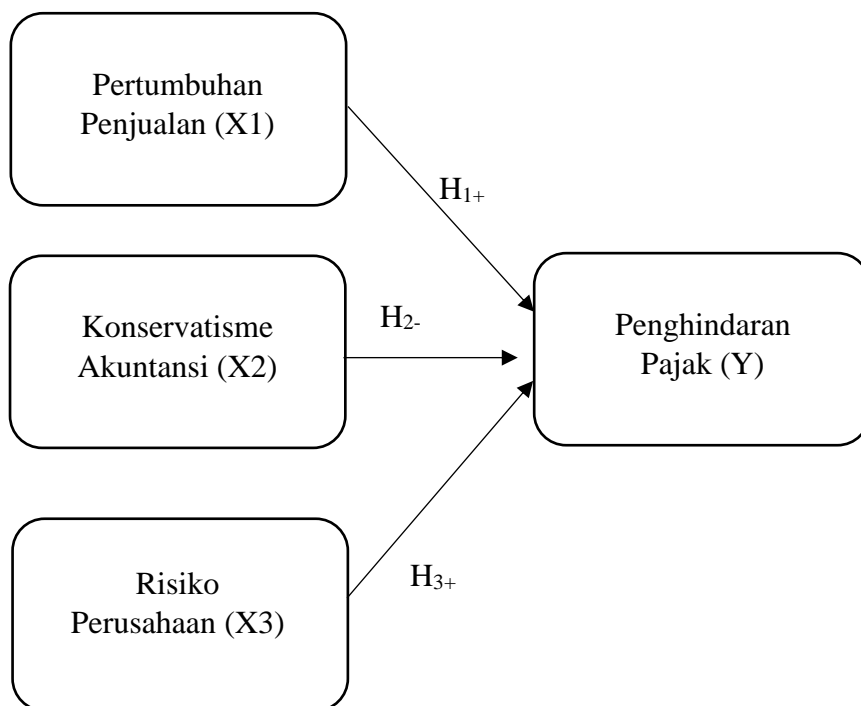
No .	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Alat Pnalisis	Hasil penelitian
			Kualitas audit (X5) <i>Tax avoidance</i> (Y)		aset tetap dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Nenti Rosdiani dan Angga Hidayat (2020)	Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatime Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak	Derivatif keuangan (X1), Konservatisme Akuntansi (X2), Intensitas Aset Tetap (X3), Penghindaran pajak (Y)	Regresi linear berganda	Derivatif keuangan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, Konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, Intensitas asset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Sumber: Data diolah, 2023

2.8 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan tinjauan teoritis dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk menggunakan variabel dependen pertumbuhan penjualan, konservatisme akuntansi dan risiko perusahaan yang diuji terhadap variabel independen yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan usaha suatu perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang dianggap dapat menurunkan laba perusahaan. Sedangkan pemerintah tidak menginginkan adanya praktik penghindaran pajak karena dapat mengurangi pendapatan negara. Hal tersebut sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Berdasarkan

pengembangan hipotesis yang telah dibentuk dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan dan risiko perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan konservatisme akuntansi memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berikut pengembangan kerangka pikir penelitian:



Gambar 2.8 1
Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: dikembangkan dalam skripsi ini, 2023

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan merupakan sinyal positif terhadap perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya tingkat penjualan yang tinggi akan menghasilkan pendapatan perusahaan yang tinggi pula. Pertumbuhan penjualan yang terjadi dapat digunakan sebagai prediksi pertumbuhan

masa yang akan datang (Wahyuni & Wahyudi, 2021). Hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap minat investor untuk berinvestasi (Pratiwi, et al., 2020).

Hubungan pertumbuhan penjualan dengan teori agensi adalah pertumbuhan penjualan memperlihatkan keberhasilan operasional perusahaan yang dilakukan oleh agen pada periode lalu dan dapat digunakan sebagai prediksi pertumbuhan di masa yang akan datang sehingga pertumbuhan penjualan yang tinggi akan memberikan persepsi positif bagi prinsipal (Widayanti & Rikah, 2021). Dalam teori agensi, agen berkewajiban untuk memenuhi tugasnya dalam mencapai target laba sesuai dengan kontrak dengan prinsipal. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat dari tahun ke tahun, hal tersebut akan berdampak pada pembayaran pajaknya. Pembayaran pajak yang tinggi dapat memicu perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Wahyuni & Wahyudi, 2021).

Pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Pengukuran pertumbuhan penjualan dapat digunakan untuk memprediksi profit perusahaan di kemudian hari sehingga dapat memberi gambaran mengenai baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan di perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Widayanti & Rikah (2021) dan Nabila & Fikri (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin besar pertumbuhan penjualan semakin besar juga kebutuhan finansial perusahaan di masa mendatang. Hal tersebut menyebabkan perusahaan berusaha untuk mempertahankan profit yang didapat. Apabila pertumbuhan penjualan suatu

perusahaan naik hal tersebut akan memungkinkan meningkatnya laba perusahaan yang mengakibatkan perusahaan berusaha untuk menekan beban pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak. Dari uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₁ :Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.9.2 Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak

Konservatisme akuntansi memberikan keuntungan bagi perusahaan karena dapat melakukan penundaan pengakuan pendapatan dan juga mempercepat pengakuan biaya. Semakin perusahaan menerapkan konservatisme akuntansi maka semakin kecil laba yang tercantum pada laporan keuangan dan menyebabkan pajak yang dikenakan juga akan kecil (Alvionita, et al., 2021).

Dalam teori agensi terdapat masalah yang timbul dari asimetri informasi. Kepemilikan informasi agen atas laporan keuangan perusahaan yang lebih banyak dari prinsipal dapat memungkinkan timbulnya kecurangan dari pihak agen untuk memperbesar laba perusahaan, namun apabila perusahaan menerapkan prinsip akuntansi konservatif hal tersebut dapat diminimalisir karena pengakuan laba ditunda sampai benar-benar terjadi.

Semakin konservatif sebuah perusahaan, laba yang diperoleh akan semakin rendah karena pengakuan pendapatan pada akuntansi yang konservatif dapat diakui jika keuntungan sudah benar-benar terjadi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alvionita, et al. (2021) dan Swandewi & Noviari (2020) yang

menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₂ :Konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.9.3 Pengaruh Risiko Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Risiko perusahaan mengindikasikan karakter eksekutif perusahaan. Apabila seorang pemimpin memiliki karakter *risk taker* maka akan berani mengambil keputusan yang besar kepada perusahaan. Diukur menggunakan standar deviasi, jika risiko perusahaan besar maka angka standar deviasi perusahaan juga akan besar. Namun, apabila eksekutif berkarakter *risk averse* maka risiko perusahaan cenderung rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng, et al. (2010) menguji pengaruh peran *Top Executive* terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil penelitian bahwa individu memiliki peran yang signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan.

Teori keagenan berkaitan dengan penyelesaian masalah yang dapat terjadi pada hubungan keagenan. Perbedaan pandangan terhadap risiko merupakan salah satu masalah yang muncul antara agen dan prinsipal. Prinsipal dan agen memiliki preferensi risiko yang berbeda, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan (Wiguna & Jati, 2017). Agen dalam hal ini adalah perusahaan menganggap bahwa tingginya beban pajak akan berisiko untuk menurunkan laba perusahaan, disisi lain prinsipal dalam hal ini adalah pemerintah menginginkan pembayaran pajak yang sesuai karna jika tidak akan berisiko pada pendapatan negara.

Dari perbedaan pandangan tersebut munculah kebijakan yang diputuskan oleh eksekutif perusahaan, salah satu contohnya adalah penghindaran pajak sehingga kebijakan yang ditentukan tersebut bukanlah tanpa sengaja (Budiman & Setiyono, 2012). Perusahaan dengan karakteristik *risk taker* akan cenderung berani mengambil risiko untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Faramitha, et al. (2020) dan Wiguna & Jati (2017) menyatakan bahwa risiko bisnis memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa apabila eksekutif perusahaan bersifat *risk taker*, nilai CETR akan semakin rendah yang menandakan bahwa praktik penghindaran pajak semakin tinggi. Sebaliknya, jika eksekutif perusahaan bersifat *risk averse* maka semakin rendah praktik penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₃ : Risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.